

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Karakteristik pendidikan nasional menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2⁹ adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman¹⁰. Kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam tetap perlu dipertahankan di tengah kemajuan zaman. Berbagai upaya antisipatif perlu dilakukan untuk meminimalisir potensi perpecahan di tengah keragaman bangsa Indonesia.

Sejarah mencatat kejadian yang memilukan pada akhir tahun 1990-an, konflik kekerasan etnis. di Indonesia cenderung terjadi selama periode reformasi kelembagaan dan renegotiasi model nasional, terutama setelah jatuhnya rezim Suharto pada tahun 1999.¹¹ Setidaknya 10.000 orang tewas secara nasional antara tahun 1997 dan 2002. Di Kalimantan Barat, ada tiga konflik utama: di Sanggau Ledo (1996-1997), Sambas (1999), dan Pontianak (2001). Sedikitnya 1.000 orang meninggal di Kalimantan Barat, dan lebih dari 50.000 mengalami insiden kekerasan etnis.¹²

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2003) h. 2

¹⁰ Bertrand, Bertrand, J. *Nationalism and ethnic conflict in Indonesia*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2004

¹¹ Achwan, R., Nugroho, H., Prayogo, D., & Hadi, S. *Overcoming violent conflict: Volume 1, peace and development analysis in West Kalimantan, Central*

¹² ibid

Potensi konflik dimungkinkan muncul kembali jika tidak ada upaya preventif melalui pendidikan. Hasil penelitian Ayami Nakaya¹³ menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan nasional Indonesia saat ini masih lemah, dalam artian belum sepenuhnya memberikan analisis kritis terhadap konflik etnis dalam negeri. Sebab, akar kekerasan yakni faktor sosial, sejarah, dan politiknya yang kompleks berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Aspek-aspek tersebut merupakan isu sensitif baik di tingkat lokal maupun nasional.

Bersumber dari data di atas, maka salah satu upaya lembaga pendidikan dan pelatihan mengambil peran dan diwujudkan dalam karya nyata. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pendidikan dan pelatihan (diklat) di Kementerian Agama yakni menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Tujuan pendidikan dan pelatihan (diklat) dimaksud tercantum dalam Peraturan Menteri Agama No. 75 Tahun 2015 (2) adalah meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap pegawai untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional yang dilandasi kepribadian dan kode etik pegawai sesuai dengan kebutuhan Kementerian Agama, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaru dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, memantapkan orientasi sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat, menciptakan pegawai yang berkualitas, profesional, berintegritas dan bertanggung jawab.¹⁴

¹³ Ayami Nakaya, *Overcoming Ethnic Conflict through Multicultural Education: The Case of West Kalimantan, Indonesia (International Journal of Multicultural Education, Volume 20 No. 1)* hh. 11

¹⁴

Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaru dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa merupakan komponen yang mampu menjadi pondasi pada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).¹⁵ Peran perekat dan pemersatu bangsa senada dengan cita- cita luhur bangsa Indonesia sejak awal berdirinya, yakni melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan inilah yang mendasari Pendidikan multikultural¹⁶.

Sejak lama sekolah – sekolah di Indonesia telah kehilangan *sense of identity, sense of belonging, sense of community, sense of cooperative*. Hilangnya identitas diri sebagai pelajar yang menuntut ilmu, dan kebersamaan sebagai warga sekolah membawa dampak ketidakpedulian serta hilangnya rasa solidaritas dan kerja sama antar warga sekolah.¹⁷

Terkait dengan kondisi di atas, lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pembina ASN ikut bertanggung jawab terhadap situasi yang memungkinkan terjadinya disintegrasi bangsa. Melalui proses pendidikan dan pelatihan guru Bahasa Indonesia diupayakan untuk ambil bagian dalam alternatif antisipasi dimaksud melalui penyusunan modul pelatihan yang bermuatan multikultural.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2006 bahan diklat meliputi : a. Bahan ajar Diklat, b. Silabus Mata Diklat dan Skenario Pembelajaran (SMD dan SP) atau juga disebut Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat

15 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, *Nasionalisme, Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*, (Jakarta: LAN RI, 2015) h. 133

16 Tilaar, Multikultural, *Tantangan- tantangan Global Masa depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grafindo, 2004. 193)

Diklat dan Rencana Pembelajaran (RBPMD dan RP), dahulu disebut GBPP dan SAP.

c. Transparansi d. Modul Diklat e. Test Hasil Belajar.¹⁸

Pendidikan dan Pelatihan Guru Bahasa Indonesia di Balai Diklat Keagamaan Denpasar bertujuan untuk membangun aparatur yang berperan sebagai pembaru dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal dimaksud berupa penyediaan modul diklat bermuatan multikultural sebagai salah satu media penyelenggaraan diklat.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Balai Diklat Keagamaan Denpasar melalui analisis kebutuhan diklat didapatkan data bahwa kelemahan dalam pelatihan guru Bahasa Indonesia yang selama ini terjadi adalah 1) terbatasnya sumber belajar yang dimiliki oleh guru peserta diklat, 2) materi diklat berupa power point, 3) bahan diklat yang tersedia berupa makalah¹⁹.

Analisis kebutuhan bahan diklat guru Bahasa Indonesia MTs dilakukan juga melalui wawancara dengan pejabat Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Dr Aep Syaifuddin Firdaus, M.Pd. selaku Kepala Bidang Program dan Pengendalian mutu, diperoleh data sebagai berikut:

Pertama, bahan ajar diklat setidaknya memuat tiga komponen pokok, yakni: (1) deskripsi mata diklat; (2) sumber belajar; dan (3) *worksheet* (Lembar Kerja). Kedua, pengembangan bahan diklat inti diserahkan kepada widyaiswara sesuai dengan ketentuan dalam Kurikulum diklat yang diterbitkan oleh Pusdiklat Tenaga Teknis

17 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penulisan Modul Pendidikan dan Pelatihan

18 Studi lapangan pada tanggal 14 Januari 2017

Pendidikan. Pengembangan bahan diklat inti, widyaiswara diberi kewenangan sesuai dengan kebutuhan di daerahnya dan kearifan lokal²⁰

Hasil wawancara dengan Widyaiswara Bahasa Indonesia Balai Diklat Keagamaan Jakarta Dra. Ika Berdiarti pada tanggal 2 Februari 2017 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ciputat, diperoleh informasi bahwa widyaiswara mengalami kendala dalam penyampaian materi Diklat guru Bahasa Indonesia karena tidak ada modul yang sesuai dengan Kurikulum 2013.²¹

Bangsa Indonesia dengan keragaman yang diyakini sebagai takdir, kehendak Tuhan yang maha Kuasa, tidak bisa ditawar namun mesti diterima. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 secara keseluruhan jumlah suku dan subsuku di Indonesia adalah 1331. Tahun 2017 BPS bekerja sama dengan Institut of *Southast Asian Studies (ISEAS)* penduduk Indonesia diklasifikasikan menjadi 633 kelompok-kelompok suku besar²² Terkait dengan bahasa, Badan Bahasa memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah di Indonesia, tidak termasuk dialek dan subdialeknya.²³

Keragaman di bidang apa pun meniscayakan terbentuknya perbedaan. Perbedaan- perbedaan selalu memunculkan potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik dan disikapi dengan arif.²⁴ Balai Diklat Keagamaan Denpasar dengan wilayah kerja

19 Wawancara dengan Dr. Aep Syaifudin Firdaus, M.Pd selaku Kepala Bidang dan Program dan Pengendalian Mutu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan RI pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 13.19 wita

20 Wawancara dengan widyaiswara Bahasa Indonesia di Pusdiklat Teknis Keagamaan Jakarta tanggal 02 Februari 2017

21 Kementerian Agama RI *Moderasi Beragama*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI cetakan kelima, 2020 h. 2

22 Ibid, h. 3

23 Ibid, h. 6

meliputi tiga provinsi dengan masing – masing karakteristiknya merupakan salah satu miniatur keragaman di Indonesia. Provinsi Bali dengan bahasa Balinya dan latar budaya alam maupun masyarakatnya yang didominasi oleh umat yang mayoritas beragama Hindu, tentu memiliki keunikan budaya maupun kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikenal dengan pulau seribu masjid. Berbagai aktivitas seni budaya dan tradisi yang perlu terus diperkaya dan dilestarikan. Budaya daerah dengan kekhasan yang dimilikinya tentu berbeda dengan provinsi Bali maupun Nusa Tenggara Timur. Sama halnya dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ciri khas penduduknya dengan kearifan lokal budayanya yang juga berbeda dengan Bali dan NTB.

Salah satu alternatif antisipasi munculnya konflik yang disebabkan keanekaragaman salah satunya melalui proses pemahaman terhadap konsep multikultural.²⁵ Multikulturalisme menurut Darma Putra²⁶ mulai mendominasi wacana publik di awal tahun 2000-an sebagai akibat dari krisis-krisis ekonomi yang berlarut-larut, munculnya kekerasan antar-etnik, gerakan-gerakan separatisme di Indonesia.

Diperlukan upaya peningkatan pemahaman dan kemampuan para pendidik terhadap materi-materi multikulturalisme²⁷. Karena harus diakui, di kalangan pendidik sendiri masih banyak yang belum memahami betul konsep-konsep multikulturalisme²⁸. Tidak sedikit di antara para pendidik yang masih berpikiran sempit mengenai

24 Tilaar *Multikulturalisme, Tantangan- tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta Grasindo, 2004 h.

25 Darma Putra, *Multikulturalisme dalam Prespektif Teori*, Universitas Kristen Satya wacana 2014. h. 27

26 Peggy Shanon Baker, et all, *A Multicultural Education Praxis: Integrating Past and Present, Living Theorist, and Practice. International Journal of Multicultural Education*, 2018 p. 48

27 Siti Julaiha, 2014. *Internalisasi Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam*; Jurnal Dinamika Volume 14 Juni 2014

dinamika keragaman dan perbedaan.²⁹ Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan guru.³⁰ Pentingnya guru mendapat kesempatan pelatihan karena gurulah yang akan mentransfer pemahaman kepada peserta didik mengenai multikultural. Hal ini mengacu kepada pernyataan bahwa pendidikan multikultural berperan membentuk pandangan peserta didik tentang kehidupan dan meningkatkan penghargaan terhadap keragaman.³¹ Menurut Asy'ari ³²Pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus dan toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah- tengah masyarakat yang plural³³

Multikultural bagi bangsa Indonesia dengan kumpulan manusia yang terdiri atas berbagai etnik dengan pluralitas budaya menjadi sebuah tawaran yang mendekati keniscayaan³⁴. Nasikun menjelaskan bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik, pertama secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, dan kedua secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam³⁵. Ada lebih dari lima ratus suku bangsa dan bahasa, ragam agama dan budaya yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia³⁶

28 ibid

29 Ibid, 118

30 Nadjamuddin Ramzbly. *Membangun Pendidikan yang Memberdayakan dan Mencerahkan*, 2005

32 Musa Asy'arie, *Pendidikan Multikultural* <http://www.kompas.com/0609/>

33 Anita Lie, *Mengembangkan Model Pembelajaran Multikultural*

34 Ibid

35 Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: pt. Raja Grafindo Persada., 2007. Hal. 33

36 Yudi Latif, *Revitalisasi Pancasila di Tengah- Tengah Dua Fundamentalisme*, 2010:250-251).

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pendidikan multikulturalisme menawarkan satu alternatif melalui konsep pendidikan berbasis pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada siswa, seperti: keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, dan ras. Walaupun pendidikan multikultural merupakan pendidikan relatif baru di dunia pendidikan, namun nilai pentingnya sudah cukup mendesak³⁷.

Multikulturalisme sebagai falsafah hidup yang mendorong setiap masyarakat majemuk untuk saling berbagi rasa, hak, dan kewajiban dalam membangun kesejahteraan³⁸.

Pendidikan multikultural merupakan gejala baru dalam pergaulan umat manusia yang mendambakan persamaan hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama bagi semua orang³⁹. Dalam penerapan strategi dan konsep pendidikan multikultural, yang terpenting dalam strategi ini tidak hanya bertujuan agar siswa mudah memahami pelajaran yang dipelajari, tetapi juga akan meningkatkan kesadaran mereka agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis. Begitu juga seorang guru tidak hanya menguasai materi secara profesional, tetapi juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti: humanisme, demokratis, dan pluralisme. Wacana pendidikan multikultural merupakan salah satu isu yang mencuat ke permukaan di era globalisasi seperti saat ini.

37 Neila Miled, Department of Educational Studies, University of British Columbia, Vancouver, Canada

38 Universitas Kristen Satya Wacana, *Multikulturalisme dalam Prespektif Teori*, 2014. h. 28

39 Education leaders' *perreception of multikultural Educational leaders' perceptions of multicultural education'*

in teachers' professional development: a case study from a Canadian school district

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1, yang berbunyi “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai agama, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa.” Pendidikan multikultural juga didasarkan pada keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan.⁴⁰

Bhinneka Tunggal Ika (kesadaran bahwa secara geografis Indonesia terdiri atas 13.000 pulau lebih yang dipisahkan/dihubungkan oleh laut dengan aneka ragam suku penduduknya (1027 suku bangsa) dan menganut aneka ragam agama dan kepercayaan, serta memiliki budaya yang beragam yang berpotensi perpecahan dan sekaligus persatuan dan SDM yang luar biasa besarnya. Soetandyo Wignyosubroto mengusulkan membacanya dibalik, bukan: “beraneka ragam tetapi bersatu”, melainkan “bersatu tetapi beraneka ragam.”⁴¹

Pertimbangan-pertimbangan itulah yang perlu dikaji dan direnungkan kembali bagi pendidik, termasuk widyaiswara. Salah satunya dengan mengembangkan modul diklat bermuatan multikultural yang mampu menjadi penunjang pembelajaran diklat yang mengakomodir sekian ribu perbedaan dalam sebuah wadah yang harmonis, toleran, dan saling menghargai.

40 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

41 Mudzhar, 2019 Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia dan Tantangan ke Depan: Tinjauan dari Aspek Keagamaan

<http://lib.iainpurwokerto.ac.id/index.php?p=showdetail&id=11625>

Tujuan yang diharapkan, dalam pengembangan modul diklat ini adalah peserta diklat mampu mengaplikasikan nilai-nilai yang dapat mencapai suatu kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengembangkan modul sehingga menunjang nilai-nilai sosio-kultural, meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai multikultural dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti merumuskan judul penelitian ini “Pengembangan Modul Diklat Guru Bahasa Indonesia MTs Bermuatan Multikultural di Balai Diklat Keagamaan Denpasar”

1.2. Identifikasi Masalah

Pendidikan multikultural merupakan salah satu alternatif untuk meminimalisir konflik yang dilatarbelakangi oleh perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Arifin⁴² mengatakan bahwa pendidikan multikultural merupakan pengembangan yang tidak membatasi dalam interaksi manusia yang menghargai heterogenitas dan pluralitas

Berbagai upaya implementasi pendidikan multikultural telah dilakukan oleh pendidik di dunia. Sebagaimana penelitian dengan fokus keragaman agama, kemasyarakatan dan perbedaan etnis antara lain: Olmedo⁴³, Menz & Van der

42 Arifin, Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosda Karya. h.3

43 Olmedo, I. M., 2004. *Raising Transnational Issues in a Multicultural Curriculum Project*. *Urban Education*, 39(3), 241-265.

Watt⁴⁴, Lykogianni,⁴⁵Okoye Johnson,⁴⁶ Jan Pakulski,⁴⁷ Gezer⁴⁸. Studi tersebut menumpukan pada peranan pendidikan multikultural di satuan pendidikan maupun lembaga pendidikan.

Balai Diklat Keagamaan Denpasar, sebagai sebuah Lembaga Pendidikan dengan salah satu tugasnya adalah meningkatkan kompetensi ASN⁴⁹ termasuk di dalamnya tenaga pendidik (guru). Guru merupakan ujung tombak penanaman nilai-nilai karakter multikultural dalam proses pembelajarannya. Melalui diklat guru mendapatkan tambahan bekal. Diklat merupakan suatu kegiatan penting yang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena guru dituntut untuk mengembangkan diri secara terus menerus agar tidak terlindas zaman⁵⁰

Terkait dengan latar belakang dimaksud, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Belum tersedianya modul Diklat yang sesuai Kurikulum Pendidikan Tahun 2013 dan bermuatan multikultural pada Diklat Guru Bahasa Indonesia Madrasah Tsanawiyah (MTs/SMP)⁵¹
- 2) Belum adanya pendekatan multikultural dalam modul Bahasa Indonesia bagi guru yang memungkinkan untuk mendefinisikan komponen budaya

44 Mentz, K. & van der Walt, J. L. 2007. *Multicultural Concerns of Educators in the Western Cape Province of South Africa*. *Education and Urban Society*, 39(3) 423-449

45 Lykogianni, R. 2008. *Tracing Multicultural Cities From the Perspective of Women's Everyday Lives*. *European Urban and Regional Studies*, 15(2) 133-143.

46 Okoye-Johnson, O. 2011. *Does Multicultural Education Improve Students' Racial Attitudes? Implications for Closing the Achievement Gap*. *Journal of Black Studies*. 42(8), 1252- 1274.

47 Jan Pakulski, *Confusions about multiculturalism*, *Journal of Sociology* 2014, Vol. 50(1) 23–36

48 Gezer, 2018 *An analysis of correlations between prospective teachers' philosophy of education and their attitudes towards multicultural education*, *Cogent Education* (2018), 5: 1475094

49 Peraturan Menteri Agama No 75 Tah 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan

50 Dogmit 2016. *Diklat online, Solusi Menambah Ilmu di Era Digital* diakses

51 Modul Diklat Guru Bahasa Indonesia MTs yang tersedia berupa Modul yang dicetak oleh Pusdiklat Teknis dan Keagamaan pada Tahun 2013

yang saling berhubungan seperti etnokultural, nasional, dan internasional dalam konten Pendidikan, saat penelitian dilakukan.

1.3. Pembatasan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, penelitian ini difokuskan pada pengembangan Modul Diklat Guru Bahasa Indonesia di Balai Diklat Keagamaan Denpasar yang bermuatan multikultural. Hal ini sejalan dengan amanat Menteri Agama RI yakni tiga mantra Kementerian Agama yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pendidikan dan Keagamaan RI Bapak Dr. Mahsusi, pada pidato pengarahannya Rapat Koordinasi Kediklatan di Hotel b' hotel Denpasar pada tanggal 31 Januari 2019⁵²53. Ketiga Mantra Kementerian Agama dimaksud adalah: 1) Moderasi Beragama; 2) Kebersamaan, dan 3) Urgensi Integrasi Data.

Hasil pengamatan penulis terhadap modul Diklat Bahasa Indonesia yang ada di Balai Diklat Keagamaan Denpasar menunjukkan bahwa modul tercetak pada tahun 2010. Isi modul mewakili Kurikulum 2006 yang dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Modul tersebut memuat materi inti Keterampilan Berbahasa Indonesia, sesuai Kurikulum dan Silabus Diklat Guru Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2010.

⁵² Rapat Koordinasi Kediklatan yang diikuti oleh Pejabat eselon III dan IV Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, NTB, dan NTT serta widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Denpasar pada tanggal 28 Januari s.d 1 Februari 2019 di 'b Hotel jalan Imam Bonjol 508 Pemecutan Klod Denpasar

yakni Modul Menulis, Modul Membaca, Modul Menyimak, dan Modul Berbicara untuk Guru Madrasah Tsanawiyah.

Secara umum, penelitian ini akan menghasilkan sebuah produk modul pendidikan dan pelatihan (diklat) bermuatan multikultural yang akan digunakan pada saat Diklat Guru Bahasa Indonesia Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Secara khusus, penelitian ini mengkaji mengenai tiga hal, yakni mengenai validitas modul diklat, kepraktisan dengan dibuktikan oleh respons guru yang berkaitan dengan keefektifannya.

Cakupan modul diklat meliputi materi teks sastra dan nonsastra khususnya di Madrasah Tsanawiyah. Hal ini berdasarkan Kurikulum dan Silabus Kediklatan yang di-SK kan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Balitbang dan Diklat) Kementerian Agama Jakarta Nomor 62 Tahun 2017.

1.4. Perumusan Masalah

Sesuai dengan pembatasan masalah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah tingkat validitas Modul Diklat Bermuatan Multikultural untuk Guru Bahasa Indonesia MTs berdasarkan validasi ahli?
- 2) Bagaimanakah kepraktisan Modul Diklat Bermuatan Multikultural dari respon Guru Bahasa Indonesia MTs ?
- 3) Bagaimanakah keefektifan penggunaan Modul Diklat Bermuatan Multikultural untuk Guru Bahasa Indonesia MTs dalam penyelenggaraan Diklat Guru Bahasa Indonesia MTs di Balai Diklat Keagamaan Denpasar?

1.5. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan Modul Diklat Bahasa Indonesia Bermuatan Multikultural yang valid.
- 2) Menghasilkan Modul Diklat Bahasa Indonesia Bermuatan Multikultural yang praktis penggunaannya
- 3) Menghasilkan modul Diklat Bahasa Indonesia Bermuatan multikultural yang efektif bagi guru Bahasa Indonesia Madrasah Tsanawiyah /SMP.

1.6. Signifikansi Penelitian

Pengembangan modul Diklat bagi Guru Bahasa Indonesia bermuatan Multikultural menjadi penting dilakukan sebagai upaya preventif, represif, dan persuasif konflik sosial. Selain hal di atas, kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi teoretis dan dimensi praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan, bidang pembelajaran khususnya kediklatan yaitu pengembangan modul diklat Bahasa Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para ahli dan praktisi pendidikan, khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan modul diklat Bahasa Indonesia yang bermuatan multikultural. Nilai praktis penelitian ini juga dirasakan oleh guru bahasa Indonesia MTs, widyaiswara pengampu

Diklat Guru Bahasa Indonesia sebagai rujukan empiris mengenai modul diklat yang dapat digunakan dalam kegiatan kediklatan.

